

ROUND TABLE DISCUSSIONS
PENGUATAN KOMPETENSI PERENCANAAN DI INDONESIA
Dalam Rangka Kongres Nasional IAP ke VIII
Four Seasons Hotel, Jakarta, 30 Oktober 2007

1. LATAR BELAKANG

Berbagai fenomena lingkungan yang terjadi dewasa ini telah mengingatkan dan memaksa kita untuk lebih bijak melakukan kegiatan ekonomi berbasis pada pengelolaan lingkungan secara benar. Bencana banjir, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, kekeringan, kemacetan lalu lintas perkotaan, kejahatan serta berbagai permasalahan sosial lainnya telah hadir dengan frekuensi dan intensitas yang relatif semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Sebagian besar lembaga baik pemerintah, swasta ataupun masyarakat secara umum telah 'mendengar dan mengetahui' pentingnya patuh terhadap tata ruang. Ironisnya banyak sekali penyimpangan penyelenggaraan tata ruang baik pada tahapan perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian. Tuntutan ekonomi dan tekanan politik tidak mampu dibendung oleh dokumen tata ruang dan penyelenggara '**pengawal tata ruang**' yang ada. Kita semua kehilangan orientasi bagaimana cara memulai '**gerakan kembali patuh**' pada aturan-aturan serta norma pemanfaatan ruang yang benar.

Tuntutan KOMPETENSI **bidang profesi penataan ruang (regional & city planner)** merupakan salah satu titik sentral dalam perwujudan penataan ruang berorientasi masa depan (*produktif dan berkelanjutan*) yang implementatif serta dapat diterima secara politis, pelaku ekonomi, masyarakat dan yang terpenting adalah jelas dan mudah dicerna oleh penyelenggara '**pengawal tata ruang**' yang ada.

Dukungan peraturan **perundangan penataan ruang yang lebih agresif (UUPR 26/2007 sebagai pengganti UUPR 24/1992)** diharapkan dapat memacu dan memberikan orientasi dalam penataan ruang. Dalam kesempatan ini bidang profesi penataan ruang harus mampu memanfaatkan momentum yang ada agar penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih efektif mendukung pemanfaatan ruang sesuai norma-norma yang seharusnya.

Semua penyimpangan harus ada sanksi yang tegas dan harus dapat ditunjukkan secara gamblang agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu sekali lagi KOMPETENSI **bidang profesi penataan ruang (regional & city planner)** harus mampu mengawal peraturan perundangan secara benar agar terwujud **kesatuan peraturan perundangan yang efektif** yang mampu memotivasi penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan benar.

Suatu saat nanti kita akan menghadapi kasus hukum berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang. Seorang pimpinan daerah, pimpinan lembaga departemen pemerintahan, perusahaan swasta atau masyarakat harus mempertanggungjawabkan kegagalan penataan ruang di wilayahnya atau di kawasan yang dikembangkan, tanpa lagi berdalih bahwa banyak permasalahan non teknis yang harus diakomodasi. Tuntutan kepastian keberlanjutan lingkungan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar setelah **dokumen penataan ruang disepakati dan dituangkan dalam peraturan perundangan yang mengikat**.

Advokasi perihal penataan ruang untuk masyarakat dan pelaku ekonomi juga harus digalakkan berupa dukungan informasi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar norma yang baik dan benar, Para perencana harus memiliki **standarisasi keahlian (sertifikasi) yang diakui secara formal**, terukur dan menjawab tuntutan permasalahan saat ini dan masa depan. Sekali lagi Advokasi membutuhkan KOMPETENSI **bidang profesi penataan ruang (regional & city planner)**

Berkaitan dengan seluruh uraian diatas, **PENGUATAN KOMPETENSI PERENCANAAN DI INDONESIA** menjadi tema sentral yang akan diangkat dalam Kongres IAP 2007. **IAP** sebagai lembaga asosiasi profesi perencana di Indonesia harus dapat mewadahi seluruh aspirasi berbagai pihak terkait tuntutan kompetensi perencana. Kompetensi anggota IAP akan **membangun pilar-pilar IAP** dan sebaliknya pilar IAP yang kokoh dapat memotivasi anggota-anggotanya untuk memiliki kompetensi pada profesi keahliannya.

Bertepatan dengan pelaksanaan Kongres Nasional IAP ke VIII tahun 2007, IAP akan mengadakan seminar dengan konsep *Round Table Discussion* yang bertajuk "Penguatan Kompetensi Perencanaan di Indonesia." Dalam seminar ini ada tiga topik yang akan dibahas, yaitu:

- 1). Perlunya penetapan standar pelaku perencanaan melalui sertifikasi.
- 2). Peluang dan tantangan UU 26/2007 terhadap dunia perencanaan, para perencana dan asosiasi profesi perencanaan.
- 3). Peningkatan kompetensi asosiasi profesi melalui *Positioning* IAP sebagai lembaga profesi yang bersifat independen yang dapat memberi penilaian (sifatnya berpengaruh terhadap Publik) terhadap penataan ruang suatu daerah ataupun produk-produk pengembang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. TUJUAN DAN SASARAN SEMINAR

Tujuan seminar "Penguatan Kompetensi Perencanaan di Indonesia" adalah penguatan kompetensi perencanaan melalui tiga alat yang dideskripsikan sebagai berikut:

- 1). Sertifikasi.
 - Kegunaan dari sertifikasi
 - Efektivitas sertifikasi sebagai standar mutu/kualitas.
 - Sertifikasi yang telah berjalan selama ini (bagaimana prosesnya, apa hambatan, kendala dan permasalahannya).
 - Perumusan metode sertifikasi di masa depan.
- 2). Tinjauan UU 26/2007
 - Pokok-pokok penting UU 26/2007.
 - Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya UU 26/2007 terhadap (1) perencana, (2) asosiasi profesi, (3) pemerintah daerah, (4) masyarakat.
 - Penyusunan usulan untuk perangkat hukum turunan dari UU (seperti PP, Keppres, Kepmen, Permen, dll).
- 3). *Positioning* IAP sebagai wadah asosiasi profesi perencana yang kompeten dan bermandat
 - Bagaimana menjembatani agar publik mudah meng'akses' dan memahami rencana tata ruang.
 - Signifikansi penilaian terhadap fungsinya (dilihat atau tidak, dipakai atau tidak, berguna atau tidak)
 - Penentuan standar-standar penilaian.

3. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan seminar akan dilakukan secara partisipatif, tidak bersifat monolog, dengan konsep *Round Table Discussion*. *Round Table Discussion* merupakan suatu konsep diskusi publik yang mengutamakan interaksi antara peserta dengan narasumber yang difasilitasi dan dipandu oleh seorang moderator.

4. MODERATOR DAN NARASUMBER

Yang akan menjadi narasumber atau pembicara dalam seminar ini adalah:

- Keynote Speaker 1 : Ir. Djoko Kirmanto (Menteri PU).
- Narasumber 1 : H. Fauzi Bowo (Gub. DKI Jakarta).
- Narasumber 2 : Imam S. Ernawi (Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU).
- Narasumber 3 : Gordon Benton (Senior Executives Lippo Group).
- Moderator : Fachri Ali

5. KISI-KISI MATERI KEYNOTE SPEECH:

Materi-materi yang akan diungkapkan pada *keynote speech* Seminar Nasional IAP 2007 oleh Menteri PU Ir. Djoko Kirmanto adalah sebagai berikut:

➤ **Peran penataan ruang dalam konstelasi pembangunan Indonesia; masa lalu, kini dan masa depan.**

Pembicara diharapkan dapat memberikan mengenai posisi dan peran penataan ruang dalam pembangunan Indonesia. Hal ini meliputi perjalanan penataan ruang di masa lalu, problematika yang dihadapi dan tantangan masa depan. Perlu juga dipaparkan mengenai peran Departemen PU sebagai pelaksana penataan ruang di Indonesia

➤ **Implementasi penataan ruang dalam pembangunan infrastruktur Indonesia**

Pembicara diharapkan dapat mengemukakan kepada peserta Kongres mengenai dinamika pembangunan infrastruktur Indonesia, problematika dan tantangan masa depan. Pemaparan juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi penataan ruang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

➤ **Peran Perencana Tata Ruang dalam Pembangunan Indonesia**

Pembicara diharapkan dapat memberikah arahan kepada peserta Kongres mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penataan ruang serta peran yang harus diambil oleh para perencana guna mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Arahan ini akan menjadi masukan yang positif dalam mendukung tujuan kongres IAP yang mengetengahkan mengenai kompetensi perencana.

6. KISI-KISI MATERI NARASUMBER 1 :

Materi-materi yang akan menjadi bahan diskusi oleh Narasumber 1 (Gubernur DKI Jakarta : H Fauzi Bowo) pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **Positioning Penataan Ruang dalam Pembangunan DKI selama ini.**

Pembicara diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan penataan ruang dalam pembangunan DKI Jakarta. Hal ini melingkupi; persoalan yang dihadapi dan tantangan masa depan. Perlu juga untuk dipaparkan mengenai Peran dan Posisi yang selama ini telah dilakukan oleh DKI Jakarta dalam melaksanakan penataan ruang

➤ **Persepsi dan Opini terhadap Proses Penataan Ruang**

Pandangan Pembicara, sebagai mantan kepala daerah, yang berperan sebagai pengguna penataan ruang termasuk di dalamnya opinisi dan kritisi terhadap produk penataan ruang, perencana penataan ruang dan pelaku pembangunan lainnya yang terkait. Diharapkan masukan ini dapat menjadi input dan umpan balik yang konstruktif terhadap dunia perencanaan dan profesi perencana dari kacamata Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang bergelut di bidang ini.

➤ **Positioning perencana tata ruang dalam pembangunan DKI.**

Pembicara diharapkan dapat memberikan apresiasi terhadap peran dan profesi perencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadi entry point dalam diskusi yang dilaksanakan, guna menelaah lebih jauh peran yang harus diambil perencana tata ruang dalam pembangunan, terutama di tingkat daerah. Persepsi dari pembicara, sebagai pengguna perencana tata ruang, diharapkan akan memberikan masukan konstruktif dalam penguatan profesi perencana di masa depan.

7. KISI-KISI MATERI NARASUMBER 2 :

Materi-materi yang akan menjadi bahan diskusi oleh Narasumber 2 adalah Ir. Imam S. Ernawi MCM, MSc. (Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum) pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

- ➔ Paradigma Penataan Ruang dalam UU 26 Tahun 2007.
Pembicara akan diminta untuk memberikan pandangan terhadap isu strategis dari adanya Undang-Undang Penataan Ruang yang baru (UU 26 tahun 2007) terhadap perubahan-perubahan atau tambahan mengenai paradigma penataan ruang.
- ➔ Peluang dan keuntungan serta tantangan yang akan dihadapi dengan adanya UU 26 tahun 2007 oleh perencana, asosiasi profesi, pemerintah daerah dan masyarakat.
Pembicara akan memaparkan dan mengidentifikasi mengenai peluang dan keuntungan serta tantangan yang dapat ditangkap dengan adanya UU 26 tahun 2007 yang dapat memberikan diferensiasi dengan masa pra UU 26 tahun 2007.
- ➔ Ilustrasi mengenai aplikasi pemberian insentif, disinsentif dan sanksi.
Salah satu hal penting yang membedakan UU 26 tahun 2007 dengan sebelumnya (UU 24 tahun 1992) adalah adanya pasal-pasal yang memberi penegasan terhadap pengendalian tata ruang, khususnya dalam hal pemberian insentif, disinsentif dan sanksi. Pembicara diharapkan dapat memberikan ilustrasi mengenai aplikasi atau pelaksanaan hal tersebut dan dapat memberi masukan terhadap ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat dijadikan masukan terhadap peraturan turunan (seperti Peraturan Pemerintah) mengenai sanksi.

8. KISI-KISI MATERI NARASUMBER 3 :

Materi-materi yang akan menjadi bahan diskusi oleh Narasumber 3 (Gordon Benton) pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

- ⇒ **Apresiasi sektor swasta terhadap penataan ruang di Indonesia**

Pembicara sebagai pihak, dari sektor swasta, yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan opini dan apresiasinya terhadap penataan ruang di Indonesia, baik terhadap produk, proses atau perencanaan tata ruang. Pembicara diharapkan dapat memberikan implikasi penataan ruang terhadap aktivitas yang dilakukannya, apakah menjadi penghambat atautkah memberikan kepastian hukum. PApresiasi ini diharapkan akan memberi input positif dalam pengembangan dunia perencanaan tata ruang

⇒ **Pengalaman sektor swasta dalam penentuan Lokasi Pembangunan**

Pembicara diharapkan dapat membagi pengalaman yang dilakukan selama ini dalam menentukan lokasi pembangunan, aspek-aspek yang dipertimbangkan dan dasar pemikirannya. Perlu pula untuk di sampaikan posisi dokumen rencana tata ruang dalam menentukan lokasi pembangunan di sektor swasta

⇒ **Kompetensi dan Tantangan perencana ruang di sektor swasta**

Pembicara diminta untuk memaparkan mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi perencana tata ruang yang berkiprah di sektor swasta. Termasuk didalamnya pembicara akan berbagi pengalaman mengenai kiprah selama ini, perencana kota yang bergerak di sektor swasta. Pembicara diharapkan pula dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi dan kemampuan yang perlu untuk dibangun perencana tata ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Hal ini penting dalam memberikan input mengenai penguatan sertifikasi perencana tata ruang.

9. WAKTU, TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN JADWAL ACARA

A. SEMINAR

Seminar “Penguatan Kompetensi Perencanaan di Indonesia” ini akan dilaksanakan pada:

Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2007

Tempat : Four Seasons Hotel**, Jl. Rasuna Said Jakarta.

Jam : 08.00 – 13.00 WIB

B. KONGRES

Kongres dilaksanakan setelah pelaksanaan seminar di tempat yang sama, dengan agenda "**Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IAP 2004-2007 dan Pemilihan Pengurus IAP periode 2007-2010**"

Susunan Acara

Seminar "Penguatan Kompetensi Perencanaan di Indonesia" dan Kongres IAP VIII

Waktu	Acara	Pembawa/Narasumber
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.35	Kata Sambutan dari Ketua Panitia	Ir. Iman Soedradjat, MPM
08.35 – 08.45	Sambutan Ketua IAP 2004-2007	Ir. Tatag Wiranto, MURP
08.45 – 09.15	Keynote Speech	Ir. Djoko Kirmanto (Menteri PU)
09.15 – 09.30	<i>Coffee Break</i>	
09.30 – 11.30	<i>Round Table Discussion</i> "Penguatan Kompetensi Perencanaan di Indonesia"	Moderator: Fachri Ali. Narasumber 1: Sutiyoso Narasumber 2: Dirjen Penataan Ruang, Departemen PU Narasumber 3: Gordon Benton
11.30 – 12.00	Perumusan Isu Strategis	Moderator: Fachri Ali.
12.00 – 12.30	Penutup Seminar	Ir. Iman Soedradjat, MPM (Ketua Panitia)
12.30 – 13.00	<i>Press Release</i>	
12.30 – 13.30	<i>ISHOMA</i>	
13.30 - selesai	KONGRES IAP VIII	

10. SEKRETARIAT PENYELENGGARA

Informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan Seminar dan Kongres IAP VIII dapat menghubungi:

Renny Windyawati (0811146743) atau Benny Hermawan (08161445577)

E-Mail : IAPKongres@yahoo.com

Alamat :

Direktorat Penataan Ruang Nasional

Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Departemen Pekerjaan Umum

Gedung G2 Lantai 2 - Jl.Pattimura no.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp : 021 – 7226577

LEMBAR KONFIRMASI*)

Sehubungan dengan Pelaksanaan *Round Table Discussion* dan Kongres Nasional IAP ke VIII pada Hari Selasa, 30 Oktober 2007 di Four Seasons Hotel, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, bersama ini saya:

Nama :
.....
Alamat :
.....
.....
.....
Telp/Hp :
.....
E-Mail :
.....
Instansi :
.....
.....

Menyatakan sebagai berikut :

- **Hadir/Tidak Hadir** pada acara *Round Table Discussion* dan Kongres IAP ke VIII, tanggal 30 Oktober 2007
- **Menginap**)/Tidak Menginap** di Four Seasons Hotel dari tanggals.d.....Oktober 2007 atau selamahari.

Terimakasih

(.....)

- *) Mohon setelah diisi, Lembar Konfirmasi ini dapat disampaikan kepada Panitia : Bu Ade atau Bu Tessy, melalui fax nomor 021-7226577 atau 021-7206415. Informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan Seminar dan Kongres IAP VIII dapat menghubungi Renny Windyawati (0811146743) atau Benny Hermawan (08161445577), E-Mail : IAPKongres@yahoogroups.com
- ***) Panitia dapat membantu reservasi akomodasi di Hotel Four Seasons dengan harga khusus sebesar Rp.850.000/room/day/net. Reservasi dapat segera diproses HANYA JIKA Surat Konfirmasi ini dilampirkan **bukti pelunasan pembayaran dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2007**. Pembayaran dapat dilakukan via transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Departemen Pekerjaan Umum a.n Renny Windyawati/Benny Hermawan, No.rek : 126-00-0502865-8